JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 September 2025 | **Revised:** 01 Oktober 2025 | **Accepted:** 21 Oktober 2025

Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Distrik Obaa Kabupaten Mappi

Johny julius Jelira[1], Fernandus Leonardo Snanfi[2]
[1]Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia, 3juliet73@gmail.com
[2]Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, Ferisnanfi@yahoo.com

Corresponding Author: 3juliet73@gmail.com[1]

Abstract: *Women's involvement in participatory planning is very important for inclusive development. This study aims to determine how women with dual roles participate in Musrembang (development planning meetings) and to identify the obstacles to the participation of women with dual roles in Musrembang. Descriptive qualitative methods were used to analyze data obtained through in-depth interviews & observation. The results of the study found that the level of women's attendance in Musrembang was quite high [66 percent attended all meetings], but their participation was symbolic. Their involvement was limited to the stage of conveying aspirations, while in the decision-making and evaluation stages, their role was still marginal. This study also found that the main barriers to women's participation in Musrembang were external and internal barriers. External barriers included patriarchal social norms, the community's dismissive view of women's proposals, lack of supporting facilities, and access to information. Internal barriers included heavy domestic burdens and lack of self-confidence.*

Keywords: *Women's Dual Roles, Participatory Planning, Mappi District*

Abstrak: Keterlibatan perempuan dalam perencanaan partisipatif sangat penting bagi pembangunan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan yang memiliki peran ganda dalam Musrembang, dan untuk mengetahui penghambat partisipasi perempuan yang memiliki peran ganda dalam Musrembang. Metode kualitatif deskripsi digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kehadiran perempuan dalam Musrembang cukup tinggi [66 persen hadir di semua pertemuan], namun partisipasi bersifat simbolis. Keterlibatan mereka terbatas pada tahap penyampaian aspirasi, sementara dalam tahap pengambilan keputusan dan evaluasi peran mereka masih marginal. Penelitian ini juga menemukan hambatan utama partisipasi perempuan dalam musrembang yakni hambatan ekternal dan hambatan internal. Hambatan ekternal seperti norma sosial patriakri, pandangan masyarakat yang meremehkan usulan perempuan, kurangnya fasilitas pendukung, dan akses informasi. Hambatan internal, yakni beban domestik yang berat, dan kurangnya kepercayaan diri.

Kata Kunci: Peran Ganda Perempuan, Perencanaan Partisipasi, Kabupaten Mappi

PENDAHULUAN

Suatu pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan efektif jika dilakukan secara komprehensif, yaitu melibatkan semua elemen publik. Partisipasi aktif masyarakat dapat dimulai dari perencanaan pembangunan. dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dibagi menjadi 4 (empat) pendekatan salah satunya adalalah pendekatan partisipatif (Nurdin et al., 2024). Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (Khairiah et al., 2022). Pendekatan partisipatif dalam perencanan dilakukan melalui pelibatan secara aktif semua pemangku kepentingan dalamm pembangunan (Ritongan & Humaizi, 2021). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) adalah salah satu bentuk perencanaan partisipatif. Musrembang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanan pembagunan (Ritongan & Humaizi, 2021).

Dalam konteks pembangunan, isu tentang perempuan dan pembangunan menjadi sedemikian penting karena selama ini perempuan pada umumnya pada posisi yang termarjinalkan. Salah satu faktor yang ditemukan adalah karena rendahnya partisipasi kaum perempuan di dalam program pembangunan (Fatimah, 2022). Keterlibatan perempuan dalam perencanaan partisipatif sudah harus terlibat dalam tahap perencanaan dari persiapan perencanaan hingga evaluasi bersama (Fahrudin, 2022). Hasil beberapa penelitian di Indonesia menunjukan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan, walaupun dari beberapa penelitian menunjukan sudah ada partisipasi perempuan (Fahrudin, 2022). Purwandari (2018) menemukan kurangnya pelibatan perempuan dalam Musrembang dikarenakan sulitnya menemukan kesepakatan antara para pemangku kepentingn, Ramazani, (2019) partisipasi perempuan dalam musrembang tergolong rendah hal ini disebabkan oleh faktor sosial budaya, pendidikan, dan pekerjaan.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, telah banyak penelitian yang mengkaji tentang partisipasi perempuan dengan fokus yang berbeda. Penelitian Kahsay, Nordén and Bulte (2021) fokus pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dikaitkan dengan hasil pengelolaan hutan, Grillos (2018) fokus penelitian pada partsipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga dan komunitas terkait dengan ketahanan terhadap kekeringan, Saleemi and Kofol (2022) fokus pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai pendidikan anak menimbulkan pengeluaran yang lebih setara untuk pendidikan anak laki-laki dan perempuan, Dessie (2023) fokus pada partisipasi perempuan dalam pemilihan, Po and Hickey (2020) fokus pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pertanian, Islam et al., (2022) membandingkan partisipasi perempuan pedesaan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi, kontribusi pendapatan terhadap pendapatan rumah tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Beberapa penelitian terdahulu belum secara tegas mengkaji tentang partisipasi perempuan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dilihat dari aspek peran ganda yang dimiliki perempuan, kurangnya penelitian tersebut yang menjadi gap penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Selaian itu, dalam prakteknya di Kabupaten Mappi, terkait dengan sulitnya mewujudkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang di Distrik Obaa lebih didasarkan pada minimnya kesempatan, dan inkonsistensi antara program yang diusulkan dengan program yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini, 1] untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan yang memiliki peran ganda dalam Musrembang di Distrik Obaa

Kabupaten Mappi, 2] untuk mengetahui penghambat partisipasi perempuan yang memiliki peran ganda dalam Musrembang di Distrik Obaa Kabupaten Mappi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hamilton & Finley (2020) metode kualitaitf mencakup wawancara, fokus group, observasi partisipasi, dan beberapa pendekatan lainnya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan narasi atau teori, menggambarkan secara dalam fenomena yang menarik (Hays & McKibben, 2021). Penelitian kualitaitf memiliki potensi untuk memajukan pengetahuan ilmiah dengan mengekstrasi, menganalisis, dan mensintesis temuan (Hays & McKibben, 2021). Demikian halnya dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang partisipasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana Perempuan berparsipasi dalam proses ini, termasuk hambatan sosial, budaya dan struktrul yang mereka hadapi.

Data primer dalam penelitian ini yakni melibatkan wawancara langsung dengan perempuan peserta Musrembang, pemangku kepentingan, dan fasilitator Musrembang di distrik Obaa. Data juga dapat dikumpulkan melalui observasi partisipatif dalam kegiatan musrembang. Adapun data sekunder, menggunakan dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan terkait perencanaan Pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Sosial yang Berlaku di Mappi

Norma sosial adalah seperangkat aturan, harapan, dan standar perilaku yang diakui dan diikuti oleh anggota suatu masyarakat untuk menjadi keteraturan. Norma sosial diidentifikasi sebagai pendorong sosial budaya mendasar yang aturan kolektif (Bechthold et al., 2024). Masyarakat Mappi yang tinggal di wilayah Selatan Papua memiliki system kekerabatan yang sangat kuat dan menjadi fondasi utama dalam struktur sosial mereka. Norma-norma sosial yang terkait dengan kekerabatan dan solidaritas sosial ini tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga membentuk identitas kelompok. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mappi menjelaskan bahwa sistem kekerabatan di Mappi didasarkan pada hubungan klan atau marga. Menurutnya, “setiap individu terikat secara turun-temurun pada kelompok marga tertentu, marga ini bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga menentukan hak, kewajiban dan peran seseorang dalam kelompok.

Tabel 1. Norma Sosial terkait Peran Gender dalam Kontek Masyarakat Mappi

Norma Sosial	Pembagian Peran		Deskrpsi
	Laki-laki	Perenpuan	
1. Pembagian Tugas	Berburuh Membangun rumah Menebang pohon	Mengurus keluarga Memasak Mengelola kebun	Norma ini mengatur pembagian tugas berdasarkan gender tetapi bersifat fleksibel. Laki-laki dan perempuan dapat bertukar peran dalam kondisi tertentu

2. Gotong royong	- Melakukan pekerjaan fisik yang memerlukan kekuatan	- Membantu dalam menyediakan konsumsi	Dalam kegiatan gotong royong, laki- laki dan perempuan bekerjasama sesuai kemampaun. Kontribusi kedua gender dihargai secara setara
3. Pengasuhan anak	- Memberikan perlindungan dan nafkah	- Mengasuh anak sehari- hari	Perempuan memiliki tanggung jawab utama dalam pengasuhan anaktetapi laki-laki juga terlibat dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan keluarga
4. Pengambilan Keputusan	- Keputusan publik dan adat	- Keputusan domestikdan keluarga	Laki-lakisering mengambil keputusan dalam konteks publik sedangkan perempuan memiliki suara kuat dalam keputusan domestik

Nilai yang Mendasari Peran Gender

Nilai-nilai seperti kehormatan, tanggung jawab, kebersamaan menjadi dasar pembagian peran gender di masyarakat Mappi. Laki-laki dipandang memiliki nilai kehormatan yang terkait dengan kemampuan mereka melindungi keluarga dan masyarakat. sementara, perempuan dihargai karena menjaga keharmonisan rumah tangga dan melestarikan budaya.

Tabel 2. Nilai yang mendasari Peran Gender Masyarakat Mappi

Nilai yang mendasar	**Pembagian Peran**		**Deskrpsi**
	Laki-laki	**Perenpuan**	
1. Kehormatan	- Melindungi keluargadan masyarakat	- Menjaga keharmonisan rumah tangga	Laki-lakidianggap memiliki nilai kehormatan yang terkait dengan kemampuan mereka melindungi keluarga sedangkan perempuan menjaga keharmonisan rumah tangga
2. Kesetaraan	- Laki-laki menghargai perempuan	- Perempuan menghargai laki-laki	Meskipun ada Pembagian peran, masyarakat Mappi menghargai

			kontribusi kedua gender secara setara
3. Kebersamaan	- Laki-lakidan perempuan bekerjasama dalam kegiatan sosial	- Perempuan dan laki-laki bekerjsama dalam kegiatan sosial	Nilai kebersamaan menekankan pentingnya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan

Peran Gender dalam Kekerabatan

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Mappi, peran gender juga sangat menonjol. Garis keturunan sering kali ditentukan melalui pihak laki-laki [patrilineal], tetapi perempuan memegang peran kunci dalam menjaga hubungan atar keluarga. Perempuan sering menjadi penghubung antara marga [klen] suami dengan marga asal mereka.

Tabel 3. Peran Gender dalam Kekerabatan dalam Masyarakat Mappi

Peran Gender	Aspek	Deskripsi
Laki-laki sebagai pemegang garis keturunan	Sistem partilineal Tanggung jawab atas kelanjutan marga	Garis keturunan ditentukan melalui pihak laki-laki. Laki- laki bertangung jawab untuk memastikan keberlanjutan marga dan melindungi hak- hak adat keluarga
Perempuan sebagai penghubung antar marga [klen]	Peran dalam pernikahan Menjaga hubungan antar marga suami dan marga asal	Perempuan memegang peran penting sebagai penghubung antar marga suami dan marga asal mereka

Peran Gender dalam Aktivitas Ekonomi

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa masyarakat Mappi memiliki pembagian peran yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan, namun dalam konteks ekonomi peran perempuan juga sangat signifikan terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Dalam aktivitas pertanian misalnya, baik laki-laki maupun perempuan bekerja bersama-sama. Perubahan zaman dan pengaruh modernisasi juga mulai mempengaruhi peran gender dalam aktivitas ekonomi masyarakat Mappi. Akses terhadap Pendidikan dan teknologi yang semakin meningkat memungkinkan perempuan untuk terlibat luas dalam sektor-sektor ekonomi formal. Di sisi lain, laki-laki juga mulai mengambil peran dalam aktivitas yang sebelumnya dianggap sebagai dominan perempuan, seperti mengasuh anak dan memasak. Meskipun demikian, nilai-nilai tradisional masih kuat mempengaruhi pola pembagian peran.

Praktek Sosial terhadap Pembangunan

Praktek sosial terkait dengan peran gender di masyarakat Mappi terlihat dalam pembagian tugas sehari-hari. Laki-laki biasanya bertugas mengelola lahan pertania, berburu, dan membangun rumah, sementara perempuan mengurus kebun, rumah tangga, dan mengasuh anak. Praktek sosial dalam pembangunan di masyarakat Mappi sangat mengandalkan prinsip gotong-royong. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Untuk membangun infrastruktur. Gotong royong tidak hanya mempercepat proses pembangunan tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan dalam masyarakat. Praktek sosial lainnya yakni partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Tokoh adat dan pemimpin lokal memegang peran penting dan sentral dalam pengambilan Keputusan. Mereka bertindak sebagai mediator dan penengah yang memastikan bahwa suara semua pihak didengar. Namun Keputusan akhir tidak diambil secara sepihak oleh tokoh adat melainkan melalui kesepakatan bersama. Meskipun laki-laki seringkali memimpin

musyawarah, perempuan juga memiliki peran penting dalam pengambilan Keputusan. Dalam beberapa kasus, perempuan juga dilibatkan dalam musyawarah.

Partisipasi Perempuan dalam Musrembang

Di Distrik Obaa, tingkat keterlibatan perempuan dalam Musrembang masih tergolong rendah. Meskipun mereka hadir dalam tahapan perencanaan, peran aktif mereka dalam proses pengambilan Keputusan dan evaluasi masih sangat terbatas. Sebagaimana disampaikan beberapa informan, bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas menghadiri musrembang untuk mengusulkan progam namun Keputusan pengambilan Keputusan sudah berada di level yang lebih tinggi.

Partisipasi perempuan di Distrik Obaa juga cenderung hanya terjadi pada tahap awal, seperti penyampain aspirasi dalam forum. Namun, pada saat perumusan kebijakan dan evaluasi program keterlibatan mereka berkurang. Menurut informan 3, dan 4 bahwa perempuan di Distrik Obaa memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan Musrembang, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala karena kurangnya sosialisasi dan dukungan bagi perempuan, terutama bagi perempuan yang belum terbiasa hadir di forum-forum resmi.

Berdasarkan hasil perbandingan data pelaksanaan Musrembang tahun 2023 dan 2024, peserta Musrembang di Distrik Obaa menunjukan kehadiran perempuan mengalami penurunan. Jumlah usulan mereka yang benar-benar masuk dalam rencana pembangunan daerah masih kurang dari 30%. Beberapa informan memberikan pandangan mereka bahwa partisipasi perempuan dalam Musrembang masih bersifat formalitas. Mereka diundang untuk hadir, tetapi keterlibatan mereka dalam diskusi dan pengambilan Keputusan masih terbatas.

Faktor Penghambat Partisipasi

Tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam partisipasi mereka dalam mengikuti Musrembag terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Tabel 4. Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Musrembang

No	Faktor Penghambat	
	Faktor Internal	**Faktor Eksternal**
1	Beban domestik	Norma budaya
2	Kepercayaan diri	Pandangan masyarakat
3	Ketebatasan pengetahuan	Fasilitas pendukung

Sebagian informan mengungkapkan bahwa mereka menghadapi hambatan budaya, terutama dari peserta laki-laki yang meremehkan usulan mereka. Meskipun tidak semua informan mengalami hal ini, adanya sikap meremehkan dari peserta laki-laki menunjukan bahwa norma gender tradisional masih mempengaruhi partisipasi perempuan dalam forum publik. Hal ini menjadi tantangan serius yang perlu diatasi untuk memastikan kesetaraan gender dalam proses pembangunan. Secara umum masyarakat memberikan respon positif bagi partisipasi perempuan dalam Musrembang. Mereka mendukung usulan-usulan yang diajukan oleh perempuan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.

Semua informan menyatakan bahwa mereka harus membagi waktu antara tanggung jawab rumah tangga dan partisipasi dalam Musrembang. Mereka mengatur waktu dengan menyelesaikan pekerjaan rumah. Hal ini menunjukan bahwa tanggung jawab domestik menjadi tantangan utama bagi perempuan yang ingin berpartisipasi aktif dalam forum publik. Meskipun demikian, mereka berhasil mengatur waktu dengan baik.

Pembahasan

Informan memainkan peran penting dalam penelitian ini. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak, tetapi mereka juga aktif dalam aktivitas publik. Teori Double Burden mengatakan bahwa perempuan seringkali harus menyeimbangkan tugas di rumah dan di luar rumah. Penemuan ini sejalan dengan teori ini. Meskipun suami dan keluarga mendukung beberapa informan, beban utama masih sering jatuh pada perempuan. Ini menunjukkan bahwa struktur gender tradisional masih mempengaruhi peran ibu rumah tangga. Sementara beberapa informan mendapat dukungan dari suami dan keluarga, tanggung jawab utama masih sering ditanggung oleh perempuan. Ini menunjukkan bahwa struktur gender tradisional masih mempengaruhi peran ibu rumah tangga meskipun ada upaya untuk membagi pekerjaan. Studi ini sejalan dengan penelitian oleh Misrina & Wicaksono (2024) yang menemukan bahwa peran ganda dapat menyebabkan perempuan lebih stres dan depresi, terutama ketika mereka harus menyeimbangkan tugas rumah dan publik.

Menurut teori peran ganda, seseorang seringkali harus menjalankan banyak peran sekaligus. Contohnya adalah peran di rumah dan di masyarakat. Dalam penelitian ini, perempuan yang ikut Musrembang di tingkat distrik menghadapi kesulitan untuk menyeimbangkan peran domestik mereka (menjadi ibu rumah tangga dan pengurus keluarga) dengan peran publik mereka (menjadi peserta pembangunan aktif). Ini sesuai dengan teori peran ganda, yang mengatakan bahwa konflik peran dapat terjadi ketika tuntutan dari berbagai peran bertentangan satu sama lain. Namun, fakta bahwa keluarga, terutama suami, membantu mengurangi beban ini menunjukkan bahwa dukungan sosial sangat penting untuk memungkinkan perempuan menjalankan peran ganda.

Penelitian sebelumnya oleh Misrina & Wicaksono (2024) juga mengungkapkan bahwa peran ganda memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental perempuan. Perempuan yang terlibat dalam peran domestik dan publik cenderung mengalami peningkatan tingkat stres dan kelelahan. Hal ini terbukti dalam penelitian ini, di mana beberapa informan menyatakan bahwa mereka sering merasa lelah setelah seharian bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa peran ganda tidak hanya memengaruhi partisipasi perempuan di forum publik tetapi juga kesejahteraan mental mereka. Teori konflik peran ganda juga menghubungkan peran ganda dengan norma sosial dan budaya yang membatasi partisipasi perempuan di ruang publik. Dalam konteks penelitian ini, norma sosial di distrik Obaa cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik, sementara laki-laki lebih dominan dalam peran publik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Gyan, Malik, & Siddique (2021), yang menemukan bahwa norma patriarki dan budaya lokal seringkali menjadi hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dukungan sosial dari keluarga, terutama suami, merupakan faktor krusial yang memungkinkan perempuan untuk secara efektif menjalankan

peran gandanya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu & Kurniawan (2020) yang menemukan bahwa dukungan keluarga dapat mengurangi beban peran ganda yang dihadapi perempuan. Dalam penelitian ini, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka menerima dukungan dari suami mereka dalam pengelolaan rumah tangga, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dapat menjadi faktor kunci dalam mendukung perempuan dalam menjalankan peran gandanya.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Hussein (2021) di Zomba yang menyatakan bahwa perempuan menghadapi beban peran ganda. Di Zomba, perempuan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan lokal seringkali harus menyeimbangkan tugas rumah tangga dengan partisipasi dalam Komite Pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan di distrik Obaa, di

mana perempuan dengan peran ganda (sebagai ibu rumah tangga dan berpartisipasi dalam Musrembang) berjuang untuk mengatur waktu dan energi mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya. Lebih lanjut, kedua studi tersebut menemukan bahwa representasi perempuan di Komite Desa (VDC) dan Komite Wilayah (ADC) masih sangat rendah. Hal ini serupa dengan situasi di Distrik Obaa, di mana partisipasi perempuan dalam Musyawarah Desa (Musrembang) masih terbatas, dan suara mereka seringkali tidak diikutsertakan dalam keputusan akhir.

Menurut Rahmawati & Kusumawati (2020), peran ganda perempuan dapat dilihat dari perspektif gender, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam ranah domestik-publik. Namun, dalam realitas sosial di Distrik Obaa, norma-norma sosial yang kuat masih menempatkan perempuan dalam peran domestik, sehingga membatasi keterlibatan mereka dalam Musrembang. Hal ini sejalan dengan pandangan Husein (2021) bahwa norma-norma patriarki dalam masyarakat seringkali membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Penelitian ini juga mendukung pernyataan Safitri & Rahman (2023) mengenai dimensi psikologis dalam definisi peran ganda: kemampuan kognitif dalam mengelola berbagai tanggung jawab, kecerdasan emosional dalam menangani stres, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif diperlukan bagi perempuan untuk memainkan peran ganda dalam mengelola urusan domestik dan publik guna memitigasi konflik. Temuan penelitian ini juga mendukung pernyataan (Putri & Susilowati, 2024) bahwa definisi peran ganda dalam konteks modern telah berkembang mencakup: penggunaan teknologi dalam manajemen peran, fleksibilitas dalam pengaturan kerja, kolaborasi dengan pasangan dalam pembagian tugas, dan integritas dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Teori peran ganda juga menekankan pentingnya pembagian tugas rumah tangga untuk mengurangi beban perempuan. Dalam penelitian ini, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka dan suami saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fadhillah (2016), yang menemukan bahwa pembagian tugas domestik yang tidak merata dapat menambah beban perempuan dan mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas domestik yang tidak merata dapat menjadi hambatan serius bagi partisipasi perempuan di forum publik.

Keterbatasan waktu dan energi merupakan tantangan utama bagi perempuan dalam menjalankan peran ganda. Dalam penelitian ini, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka seringkali kesulitan mengatur waktu antara tanggung jawab domestik dan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muis dkk. (2020) yang menemukan bahwa konflik peran ganda dapat memengaruhi kinerja pegawai perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan Herlina Kamkopimu, ia seringkali kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan dan rumah, terutama ketika ada tugas-tugas mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan energi dapat mengurangi partisipasi perempuan dalam forum publik. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran ganda tidak hanya memengaruhi partisipasi perempuan dalam forum publik, tetapi juga kinerja mereka di tempat kerja.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang mendapatkan dukungan keluarga, terutama dari suami, lebih cenderung aktif dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepemimpinan Daerah). Hal ini sejalan dengan temuan Orisadare (2019) yang menyatakan bahwa dukungan sosial dari laki-laki dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Namun, di Kabupaten Obaa, dukungan laki- laki terhadap perempuan masih terbatas, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam Musrembang. Amirkhanyan dkk. (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah akan meningkat jika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya partisipasi perempuan dalam Musrembang turut menyumbang pada rendahnya tingkat partisipasi perempuan.

Partisipasi perempuan dalam Musrembang (Perencanaan dan Pembangunan) di Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi, merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks peran ganda perempuan. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa meskipun perempuan sangat termotivasi untuk berpartisipasi, mereka seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan publik. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat bervariasi dari simbolis hingga kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan di Kecamatan Obaa cenderung bersifat tokenistik, yaitu kehadiran mereka namun belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Teori partisipasi Arnstein (1969) membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: non-partisipasi, tokenisme, dan kekuatan masyarakat. Dalam konteks studi ini, partisipasi perempuan di Kecamatan Obaa dapat dikategorikan sebagai tokenisme. Hal ini terbukti dalam temuan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun perempuan hadir dalam Musrembang, tidak semua usulan mereka dimasukkan ke dalam rencana pembangunan akhir.

Lebih lanjut, teori Arnstein menekankan pentingnya proses partisipasi yang inklusif dan interaktif. Dalam konteks Musrembang (Perencanaan dan Pembangunan) di Distrik Obaa, proses partisipasi masih didominasi oleh laki-laki, terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal ini menciptakan hambatan bagi partisipasi penuh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan hadir dalam Musrembang, proses partisipasi yang tidak inklusif dan interaktif menjadi hambatan utama bagi partisipasi penuh mereka.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nutsugbodo et al. (2020), yang menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Ghana masih bersifat paksaan dan koersif. Artinya, partisipasi perempuan tidak semata-mata berasal dari keinginan mereka sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial dan insentif material. Dalam konteks Musrembang di Distrik Obaa, partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dukungan keluarga atau tekanan sosial untuk menghadiri forum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrembang tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi internal tetapi juga oleh dukungan eksternal dari keluarga dan masyarakat. Namun, penelitian ini berbeda dengan Nutsugbodo et al. (2020) dalam hal tingkat partisipasi. Penelitian di Kakum menunjukkan tiga tingkat partisipasi perempuan (spontan, terinduksi, dan koersif), sementara penelitian di Distrik Obaa lebih menekankan pada partisipasi perempuan dengan peran ganda. Di Kakum, partisipasi spontan dianggap sebagai bentuk partisipasi yang ideal, tetapi terhambat oleh partisipasi terinduksi dan koersif. Sementara itu, di Distrik Obaa, partisipasi perempuan lebih dipengaruhi oleh beban peran ganda dan kurangnya kesempatan untuk terlibat aktif.

Reed (2008) menekankan bahwa kualitas keputusan yang dibuat melalui partisipasi pemangku kepentingan sangat bergantung pada sifat proses yang menghasilkan keputusan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa proses partisipasi dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) di Kabupaten Obaa masih belum optimal. Meskipun perempuan hadir dalam Musrembang, usulan mereka seringkali tidak diakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses partisipasi yang tidak inklusif berdampak pada kualitas keputusan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Reed bahwa proses partisipasi yang buruk akan menghasilkan keputusan yang tidak responsif terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan.

Reed juga berpendapat bahwa partisipasi perlu dilembagakan untuk keberhasilan jangka panjang. Keberhasilan proses partisipasi bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan secara kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) belum

sepenuhnya dilembagakan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Reed. Pandangan Chambers (2020) menekankan bahwa partisipasi dalam pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam studi ini, temuan menunjukkan bahwa meskipun perempuan di Kabupaten Obaa menghadiri Musrembang, keterlibatan mereka masih terbatas pada kehadiran dan belum sepenuhnya aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan belum mencapai tingkat keterlibatan aktif yang diharapkan dalam pendekatan pembangunan partisipatif.

Studi ini mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrembang dipengaruhi oleh faktor budaya dan norma sosial. Sebagaimana dicatat oleh Theodora Tanggipaimu, dalam masyarakat kita, perempuan seringkali dianggap tidak pantas untuk berbicara di forum. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan di ranah publik merupakan hambatan serius bagi partisipasi perempuan dalam Musrembang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hussein (2021) yang menemukan bahwa norma sosial dan budaya yang memperkuat dominasi laki-laki dalam pemerintahan merupakan hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dalam konteks ini, teori partisipasi Arnstein (1969) juga menekankan pentingnya perubahan norma sosial dan budaya sebagai kunci untuk mencapai partisipasi yang inklusif. Perubahan norma sosial dan budaya dapat dicapai melalui kampanye kesadaran gender dan pendidikan yang peka gender. Dalam konteks Musrembang di Kabupaten Obaa, perubahan norma sosial dan budaya dapat dicapai melalui dialog dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Lebih lanjut, studi ini juga mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrembang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti beban kerja dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan hambatan serius bagi partisipasi perempuan dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Islam dkk. (2022) yang menemukan bahwa beban kerja dan tanggung jawab rumah tangga merupakan hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Penelitian ini berbeda dengan studi Hussein (2021) yang menyoroti kurangnya sumber daya keuangan dan pendidikan sebagai hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam politik lokal. Sementara itu, di Distrik Obaa, meskipun faktor ekonomi juga disebut sebagai hambatan, studi tersebut menekankan beban peran ganda dan kurangnya fasilitas pendukung sebagai tantangan utama.

Penelitian Hussein di Zomba mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat kebijakan dan peraturan yang mendukung partisipasi perempuan, implementasinya masih lemah. Sementara itu, di Distrik Obaa, studi tersebut menekankan perlunya perubahan kebijakan dan norma sosial untuk memfasilitasi partisipasi perempuan yang lebih efektif. Selain faktor eksternal, partisipasi perempuan dalam Musrembang juga dipengaruhi oleh hambatan struktural, seperti akses informasi dan fasilitas pendukung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gyan, Malik, & Siddique (2021) yang menemukan bahwa kurangnya akses informasi dan fasilitas pendukung merupakan hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Dalam penelitian ini, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami kesulitan menghadiri Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) karena lokasi yang terpencil dan kurangnya fasilitas penitipan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan struktural, seperti aksesibilitas lokasi dan fasilitas pendukung, menjadi tantangan bagi partisipasi perempuan dalam Musrembang.

Penelitian ini juga mendukung pandangan Chambers (2020) yang mengakui bahwa hambatan struktural seperti kurangnya akses informasi dan fasilitas pendukung dapat

menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Temuan ini mendukung temuan Sartas dkk. (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan lokasi, waktu, dan intervensi. Penulis juga menemukan hal yang sama dengan studi Gyan & M'Carthy (2021) yang menemukan bahwa kemiskinan dan keterbatasan finansial merupakan hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Temuan ini juga relevan dengan konteks Kabupaten Obaa, di mana perempuan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi. Keterbatasan finansial dapat menghalangi perempuan untuk menghadiri Musrembang, terutama jika membutuhkan biaya transportasi. Lebih lanjut, perempuan di Kabupaten Obaa mungkin lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sehingga partisipasi dalam Musrembang menjadi prioritas kedua.

Penelitian di Ghana menunjukkan bahwa tanggung jawab domestik yang berat, seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga, membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Obaa, di mana perempuan seringkali memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Waktu yang terbatas dan jadwal Musrembang yang tidak fleksibel dapat menghambat partisipasi aktif perempuan. Studi ini juga menemukan bahwa perempuan adat Mappi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, masih sangat tunduk kepada laki-laki. Budaya patriarki yang mendominasi masyarakat dapat membuat perempuan merasa tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan, sebagaimana penelitian oleh Gyan & Mfoafo-M'Carthy (2022) menemukan bahwa norma-norma patriarki yang kuat di pedesaan Ghana menghambat partisipasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menyusun rancangan rencana strategis berbasis BSC untuk Kedeputian Bidang Infrastruktur MKG yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja melalui penjabaran visi dan misi organisasi ke dalam empat perspektif utama: *stakeholder*, *customer*, *internal process*, serta *learning and growth*. Dengan pendekatan analitis yang dimulai dari identifikasi faktor SWOT, penetapan KSF, hingga pemetaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (KPI), penelitian ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan aplikatif. Temuan strategis dari penelitian ini menegaskan pentingnya modernisasi sistem, penguatan kapasitas SDM, dan tata kelola data sebagai fondasi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan dinamika tantangan eksternal. Penerapan BSC di lingkungan Kedeputian Infrastruktur MKG dapat direkomendasikan sebagai model strategis yang dapat direplikasi oleh unit organisasi serupa di sektor pemerintahan teknis lainnya, guna mendorong penguatan sistem pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ahmad, M. N., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2024). Strategy Map Balanced Scorecared untuk Keberlanjutan UMKM di Alun-Alun Lampa Polewali Mandar. *SEIKO : Journal of Management & Business*, *7*(1), 652–664.

Dewi, A. N. D., & Rahayu, Y. (2016). Analisis Key Success Factors Sebagai Alat Mempertahankan Keunggulan Bersaing. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *5*, 1–16.

Hartini, H., & Habibi, D. (2023). Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *3*(2), 198–209. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.156

Khairani, A., Jannah, N., & Aulia, P. (2024). Implementasi Penerapan Balanced Scorecard Dalam Pengelolaan Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(2), 79–87.

Ky, A. M., Prayogi, G. A., & Sukmana, A. (2020). PENILAIAN KINERJA ORGANISASI MENGGUNAKAN METODE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) (STUDI KASUS: HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS WIDYATAMA). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, *6*, 163–166.

Lueg, R., & Vu, L. (2014). Success factors in Balanced Scorecard implementations -A literature review **. *Management Revue*, *26*(4), 306–327. https://doi.org/10.1688/mrev-2015-04-Lueg

Mariza, I. (2003). Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard. *The Winners*, *4*, 127–137.

Mashuri, & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). *Jurnal Perbankan Syariah*, *1*(1), 97–112. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps

Narutomo, T. (2012). PENERAPAN BALANCED SCORECARD UNTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. *Jurnal Bina Praja*, *4*, 189–200.

Primanda, D., Burga, M. N., Juliansyah, A., & Nurfauziah, N. (2022). EFEKTIVITAS APLIKASI INFO BMKG DALAM MEMBERIKAN INFORMASI CUACA DAN BENCANA TERHADAP MASYARAKAT KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Ilmiah Neo Politea*, *3*(2).

Rasidi, R., & Sadmoko, R. (2019). Penerapan Konsep Balanced Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *45*(2), 189–202. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.689

Sudaryanto. (2024). Peran KPI Dalam Mendorong Kinerja Karyawan dan Produktivitas Organisasi. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital (JIMaKeBiDi)*, *1*(2).

Sundari, S., Amelia, E., Anggreani, A. K., & Syamsuddin. (2024). Literature Review : Analisis Penerapan Balanced Scorecard Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *09*(02), 248–259. http://jak.uho.ac.id/index.php/journal

Wasliman, I., Rostini, D., & Iriantara, Y. (2021). *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling Implementasi Balanced Scorecard dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pendidikan Artikel info*. *4*(2), 157–167.

Wulandari, R., Fahmi, I., & Nurmalina, R. (2017). Perencanaan Strategis dengan Pendekatan Balance Scorecard pada Perusahaan Properti (Studi Kasus : Elang Group). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. https://doi.org/10.17358/jabm.3.2.299